



STRATEGI HOLISTIK PENGUATAN SILA PERSATUAN: INSTRUMEN FUNDAMENTAL PERWUJUDAN KARAKTER BANGSA YANG UTUH DAN BERDAULAT

Zainudin Hasan¹, Muhammad Mustofa², Muhammad Dhoni Magribi³, Zaein
Norika Marsyanda⁴

Fakultas Teknik, Universitas Bandar Lampung

I. Z.A Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung

Lampung E-mail: Zainudinhasan@ubl.ac.id¹, muhammadmustofa20237@gmail.com²

28331017@student.ubl.ac.id³, zaeinnorikamarsyanda@gmail.com⁴

Abstract. *This study presents a holistic analysis of the strategies for strengthening the "Sila Persatuan Indonesia" (Indonesian Unity), the third principle of Pancasila. This principle is positioned as a fundamental instrument for realizing a national character that is whole, sovereign, and robust, which is defined not as homogenization but as a harmony that unites diversity. The analysis focuses on diagnosing contemporary challenges that threaten unity, covering three main domains: digital threats (political polarization, disinformation), ideological threats (radicalism, exclusivism), and socio-structural threats (inequality, injustice). This article systematically outlines a three-pillar strategic response. First, the cultural pillar (social immunity) focuses on the revitalization of "gotong royong" (mutual cooperation), the utilization of local wisdom for conflict resolution, and intercultural dialogue. Second, the institutional pillar (systemic shield) includes the revitalization of Pancasila Education (PPKn) to be digitally relevant, the implementation of legal frameworks for conflict management, and regional autonomy for justice. Third, the digital pillar (narrative fortress) which emphasizes ethical digital literacy and a positive narrative offensive. The results indicate that a holistic synthesis of these three strategies can transform the Principle of Unity into an active instrument for realizing a national character that is "whole" through the restoration of dialogue, "fundamental" through the internalization of values, and "sovereign" through the formation of a global outlook with a nationalist spirit.*

Keywords: *Indonesian Unity Principle, National Character, Sovereignty of the Republic of Indonesia, Holistic Strategy, Political Polarization, Radicalism, Digital Literacy, Mutual Cooperation.*

Abstrak. Kajian ini menyajikan analisis holistik mengenai strategi penguatan Sila Persatuan Indonesia, sila ketiga Pancasila. Sila ini diposisikan sebagai instrumen fundamental untuk mewujudkan karakter bangsa yang utuh, berdaulat, dan kokoh, yang dimaknai bukan sebagai penyeragaman melainkan harmoni yang menyatukan keberagaman. Analisis difokuskan pada diagnosis tantangan kontemporer yang mengancam persatuan, mencakup tiga domain utama: ancaman digital (polarisasi politik, disinformasi), ancaman ideologis (radikalisme, eksklusivisme), dan ancaman sosial-struktural (kesenjangan, ketidakadilan). Artikel ini menguraikan secara sistematis tiga pilar respons strategis. Pertama, pilar kultural (imunitas sosial) yang difokuskan pada revitalisasi gotong royong, pemanfaatan kearifan lokal sebagai resolusi konflik, dan dialog antarbudaya. Kedua, pilar institusional (perisai sistemik) yang mencakup revitalisasi Pendidikan Pancasila (PPKn) agar relevan secara digital, implementasi kerangka hukum penanganan konflik, dan otonomi daerah untuk keadilan. Ketiga, pilar digital (benteng narasi) yang menekankan literasi digital etis dan ofensif narasi positif. Hasilnya menunjukkan bahwa sintesis holistik dari ketiga strategi inilah yang dapat mentransformasi Sila Persatuan menjadi instrumen aktif untuk mewujudkan karakter bangsa yang "utuh" melalui pemulihan dialog, "fundamental" melalui internalisasi nilai, dan "berdaulat" melalui pembentukan wawasan global berjiwa nasionalis.

Kata Kunci: *Sila Persatuan Indonesia, Karakter Bangsa, Kedaulatan NKRI, Strategi Holistik, Polarisasi Politik, Radikalisme, Literasi Digital, Gotong Royong*

PENDAHULUAN

Sila Persatuan Indonesia, sila ketiga dalam Pancasila, bukanlah sekadar sebuah cita-cita pasif atau warisan historis. Secara filosofis, sila ini merupakan landasan dinamis yang berfungsi sebagai instrumen fundamental untuk mewujudkan karakter bangsa yang

utuh, berdaulat, dan kokoh. Dalam konteks Indonesia, persatuan dimaknai bukan sebagai penyeragaman, melainkan sebagai harmoni yang menyatukan perbedaan suku, ras, budaya, dan agama, dengan semangat mengutamakan kepentingan bangsa di atas golongan.¹

Perwujudan karakter bangsa yang dicirikan sebagai utuh (tidak terpecah secara sosial dan moral), fundamental (memiliki landasan nilai yang kokoh), dan "berdaulat" (mampu berdiri mandiri dan setara dalam kancah global) secara langsung bergantung pada keberhasilan penguatan sila persatuan. Tanpa persatuan, kedaulatan negara terancam, dan karakter bangsa akan mengalami erosi.

Laporan analisis ini menguraikan diagnosis tantangan kontemporer yang mengancam persatuan dan merumuskan strategi holistik untuk memperkuat Sila Persatuan. Strategi ini mencakup tiga pilar utama: strategi kultural untuk membangun imunitas sosial, strategi institusional untuk menyediakan perisai sistemik, dan strategi digital untuk memenangkan benteng narasi di era modern. Memahami Sila Persatuan Indonesia menuntut pemahaman akan dua dimensi yang tak terpisahkan: dimensi filosofis-eksistensial dan dimensi fungsional-instrumental. Secara filosofis, Persatuan Indonesia adalah landasan eksistensial bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hubungan antara persatuan dan kedaulatan bersifat mutlak. Pembukaan UUD 1945 secara tegas menyatakan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang merupakan penjabaran langsung dari Sila Persatuan.²

Kewajiban menjaga kedaulatan NKRI, yang diwujudkan melalui semangat Bela Negara, berakar pada kesadaran akan persatuan tersebut. Aparatur Sipil Negara (ASN), misalnya, secara spesifik berfungsi sebagai "perekat pemersatu bangsa" yang wajib menjaga kedaulatan negara. Dengan demikian, persatuan bukanlah sekadar tujuan, melainkan syarat utama (*sine qua non*) bagi tegaknya kedaulatan. Tanpa ikatan kolektif ini, konsep "bangsa" dan "negara" kehilangan maknanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dimensi Fungsional Persatuan sebagai Perisai Karakter di Era Global

Dalam dimensi fungsionalnya, persatuan berfungsi sebagai perisai karakter bangsa dalam menghadapi tantangan zaman. Di era globalisasi, yang ditandai dengan arus individualisme, liberalisme, dan kapitalisme, karakter bangsa menghadapi krisis identitas dan moral. Persatuan dan kesatuan, yang diinternalisasi melalui pendidikan, berfungsi sebagai benteng untuk memilah dan memfilter budaya asing, menumbuhkan rasa cinta tanah air, dan mencegah pergeseran nilai yang dapat mengikis jati diri. Kemampuan untuk berperan di kancah global tanpa meninggalkan identitas nasional sebuah karakter yang berwawasan global berjiwa nasionalis hanya dapat tumbuh jika fondasi

¹ Afif Rahadi and Fatma Ulfatun Najicha, "Menciptakan Persatuan Sekaligus Membentuk Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Dan Pancasila Di Era Globalisasi," no. Desember (2023).

² Aspek Pertahanan et al., "Persatuan Indonesia Yang Berdasarkan Kesepakatan Oleh Aparatur Sipil Negara Kementerian Pertahanan Untuk Bela Negara" 4 (2019).

persatuannya kokoh.³ Penguatan Sila Persatuan menghadapi tantangan multidimensi yang kompleks dan saling terkait, membentuk apa yang dapat disebut sebagai "Nexus Disintegrasi". Ancaman di ruang digital memperburuk perpecahan ideologis, yang seringkali berakar pada kesenjangan sosial-struktural.

Ancaman Digital Polarisasi, Disinformasi, dan Erosi Dialog Sipil

Ruang digital telah menjadi arena utama pertempuran narasi yang mengancam persatuan. Fenomena polarisasi politik telah menciptakan keretakan yang signifikan dalam masyarakat. Polarisasi ini bukan sekadar perbedaan pendapat, melainkan fragmentasi opini publik yang memecah masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang terisolasi secara ideologis.⁴ Kondisi ini menghambat, bahkan mematikan, praktik dialog sipil yang esensial bagi demokrasi. Dalam ruang yang terpolarisasi, disinformasi dan hoaks politik berkembang biak. Hoaks politik di era *post-truth* di mana emosi lebih berpengaruh daripada fakta secara langsung melemahkan ketahanan nasional dan berpotensi memecah belah NKRI. Penyebaran hoaks terkait isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) menjadi ancaman serius bagi persatuan bangsa.⁵

Radikalisme merupakan ancaman nyata yang bertujuan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi kelompoknya, seringkali melalui rencana jangka panjang yang dapat memicu perubahan dramatis atau konflik. Bahaya radikalisme terletak pada kemampuannya menyebarkan paham yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, memecah belah umat, dan berpotensi melahirkan generasi yang intoleran dan asosial. Gerakan radikal seringkali mengeksploitasi sentimen keagamaan meskipun yang menjadi faktor pendorong utamanya adalah "emosi keagamaan", bukan ajaran agama itu sendiri untuk melegitimasi tindakannya. Bersama terorisme, radikalisme menjadi ancaman nyata yang membutuhkan program kesadaran bela negara yang kuat dari seluruh komponen bangsa.⁶

Ancaman digital dan ideologis seringkali berakar dan tumbuh subur di atas fondasi masalah sosial-struktural. Kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan sosial adalah faktor utama yang dapat memicu respons radikal. Ideologi radikal berkembang subur di daerah-daerah di mana masyarakat merasa terpinggirkan (*termarginalisasi*) dan merasakan bahwa keadilan tidak diwujudkan oleh pemerintah. Realitas sosial seperti kemiskinan, sulitnya akses pendidikan, dan lilitan utang, merupakan potret ketidakadilan yang dapat mengikis rasa persatuan. Di saat yang sama, korupsi dan gaya hidup mewah yang dipertontonkan oleh sebagian aparat justru mencederai nilai-nilai Pancasila dan menjauhkan kepercayaan publik. Ditambah dengan erosi identitas budaya lokal akibat

³ Dodik Kariadi, "Revitalisasi Nilai-Nilai Edukatif Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Masyarakat Berwawasan Global Berjiwa Nasionalis" 1 (2016).

⁴ Prof Amilin and M Si, "Pengaruh Hoaks Politik Dalam Era Post-Truth Terhadap Ketahanan Nasional Dan Dampaknya Pada Kelangsungan Pembangunan Nasional," no. September (2019): 5–11.

⁵ Universitas Medan Area, "POLARISASI POLITIK DAN TANTANGAN TERHADAP DIALOG SIPIL : SUATU ANALISIS KOMUNIKASI POLITIK," n.d., 1–11.

⁶ Universitas Negeri Malang, "HAKEKAT NILAI PERSATUAN DALAM KONTEKS INDONESIA (Sebuah Tinjauan Kontekstual Positif Sila Ketiga Pancasila)" 3 (n.d.): 56–63.

globalisasi dan menguatnya sikap individualistis, fondasi sosial persatuan menghadapi tekanan berat.⁷

Menghadapi ancaman yang mengakar, strategi penguatan persatuan harus dimulai dari revitalisasi modal sosial dan budaya bangsa. Strategi kultural berfungsi sebagai sistem imunitas internal yang membangun ketahanan masyarakat dari dalam. Gotong royong bukan sekadar warisan budaya, melainkan instrumen praktis untuk memperkuat persatuan dan mewujudkan keadilan sosial. Sebagai implementasi nyata dari kelima sila Pancasila, gotong royong adalah alat ampuh untuk memperkuat ikatan sosial dalam keberagaman.

Dalam praktiknya, kegiatan seperti kerja bakti atau membantu korban bencana melibatkan berbagai kelompok masyarakat, meningkatkan solidaritas, dan mengurangi potensi perpecahan. Gotong royong adalah cara praktis untuk mencapai keadilan sosial (amanat Sila Kelima), di mana semua individu, kaya maupun miskin, berpartisipasi dan merasakan manfaatnya secara setara.

Penguatan Kearifan Lokal sebagai Teknologi Resolusi Konflik

Indonesia kaya akan kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai luhur kemanusiaan, persaudaraan, dan persatuan. Kearifan lokal ini berfungsi sebagai "teknologi resolusi konflik" yang telah teruji oleh waktu. Berbagai ungkapan seperti "*Torang Samoa Basodara*" di Minahasa, "*Dalihan Na Tolu*" di Batak, atau tradisi "*Rumah Betang*" di Dayak, semuanya bermuara pada makna membangun persaudaraan. Terbukti, banyak konflik yang buntu jika diselesaikan melalui bingkai politis dan yuridis, justru dapat diselesaikan secara efektif melalui bingkai kearifan lokal, seperti tradisi Bakar Batu di Papua. Memelihara dan menghormati kearifan lokal ini sangat penting untuk memperkuat solidaritas sosial.

Untuk melawan polarisasi dan eksklusivisme, dialog yang proaktif dan terfasilitasi sangatlah penting. Dialog antaragama dan antarbudaya harus didorong oleh pemerintah dan lembaga masyarakat sipil untuk mempromosikan pemahaman yang lebih baik dan membangun hubungan yang harmonis. Melalui seminar, lokakarya, atau pertemuan komunitas, individu dari latar belakang berbeda dapat bertukar pengetahuan dan pengalaman, yang pada gilirannya akan mengurangi prasangka dan memperkuat empati. Toleransi antar-umat beragama adalah kunci kemajuan bangsa, dan dialog adalah instrumen utama untuk merawatnya. Strategi kultural harus didukung oleh kerangka kerja institusional yang sistemik dan kuat. Peran negara sangat vital dalam menyediakan payung hukum, sistem pendidikan, dan struktur pemerintahan yang adil untuk melindungi persatuan.

Revitalisasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Pendidikan adalah instrumen utama dalam internalisasi nilai-nilai persatuan. Namun, metode PPKn yang ada sering dianggap terlalu normatif dan teoritis, sehingga

⁷ Nur Khamid and Dosen Iain Surakarta, "Bahaya Radikalisme Terhadap NKRI," n.d.

resisten bagi generasi muda. Revitalisasi PPKn mutlak diperlukan.⁸ Strategi revitalisasi ini harus mencakup adaptasi dengan dunia digital, seperti penggunaan video pendek, *meme*, komik, dan Instagram. Tujuannya bukan sekadar menghafal, tetapi membangun wawasan global warga negara yang tetap dijiwai rasa nasionalisme. PPKn yang direvitalisasi akan menghasilkan warga negara yang dapat berperan efektif di kancah global tanpa meninggalkan jati diri dan falsafah Pancasila.⁹

Negara harus memiliki mekanisme yang jelas untuk menangani konflik sosial. Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial menyediakan kerangka hukum yang komprehensif.¹⁰

Kerangka kerja ini mencakup tiga fase krusial:

1. Pencegahan Konflik: Termasuk memelihara kondisi damai dan membangun sistem peringatan dini.
2. Penghentian Konflik: Serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan dan membatasi eskalasi.
3. Pemulihan Pascakonflik: Meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi untuk mengembalikan harmoni sosial.

Penegakan hukum yang adil dan implementasi UU ini secara konsisten menjadi perisai sistemik untuk mencegah konflik meluas dan mengancam disintegrasi.

Otonomi Daerah sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi

Strategi institusional yang paling fundamental adalah mengatasi akar masalah ketidakadilan sosial-struktural. Di sinilah peran Otonomi Daerah (Otda) menjadi krusial. Otda dirancang untuk memberikan kewenangan luas kepada daerah, yang diharapkan dapat mempermudah peningkatan kesejahteraan rakyat, pelayanan publik, dan daya saing daerah.¹¹ Dengan mengatasi ketidakpuasan daerah terkait distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang, Otda berfungsi sebagai instrumen vital untuk mencegah kekecewaan rakyat yang dapat mengarah pada disintegrasi. Meskipun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan disparitas dan birokrasi, penguatan otonomi daerah yang berorientasi pada keadilan adalah strategi jangka panjang untuk meredam potensi konflik yang berakar pada ekonomi.

Di era kontemporer, medan pertempuran terbesar bagi persatuan adalah ruang digital. Kemenangan di ruang ini tidak cukup diraih dengan sikap defensif, tetapi membutuhkan strategi "Triad Digital" yang proaktif: literasi sebagai perisai, narasi positif sebagai tombak, dan komunikasi strategis sebagai sistem pengirimannya. Upaya literasi digital selama ini terlalu fokus pada penelusuran informasi hoaks. Padahal, analisis

⁸ Pritha Trisna Saraswati, Universitas Duta, and Bangsa Surakarta, "REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MENINGKATKAN" 2 (2025): 198–204.

⁹ Saraswati, Duta, and Surakarta.

¹⁰ Penanganan Konflik Sosial et al., "LEMBARAN NEGARA," no. 116 (2012).

¹¹ Sonia Desta et al., "Peran Otonomi Daerah Dalam Mencegah Disintegrasi: Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Di Indonesia Undang-Undang Dengan Berdasar Atas Pesatuan," 1999.

menunjukkan bahwa ujaran kebencian (*hate speech*) tidak hanya muncul dalam informasi bohong, tetapi juga bisa menunggangi informasi yang benar.¹²

Oleh karena itu, model literasi digital harus diperluas melampaui *critical consuming* (konsumsi kritis). Model ini harus mencakup *moral value* (nilai moral), yang terdiri dari *ethical behavior* (perilaku etis) dan *motivation skill* (keterampilan motivasi). Literasi digital yang etis ini menjadi perisai moral bagi warga negara untuk tidak hanya mengidentifikasi hoaks, tetapi juga untuk menolak menyebarkan kebencian, bahkan jika informasinya faktual.¹³ Sikap defensif melawan hoaks tidak akan cukup memenangkan persatuan. Diperlukan sebuah ofensif narasi positif untuk membangun kebanggaan dan optimisme kolektif. Media sosial adalah sarana strategis untuk menanamkan nilai kebangsaan dengan cara ini.¹⁴

Contoh sukses seperti akun @goodnewsfromindonesia (GNFI) membuktikan bahwa konten positif mengenai budaya, prestasi, sejarah, dan inovasi Indonesia sangat efektif. Dengan menyajikan narasi visual yang inspiratif dan menonjolkan hal-hal baik, akun ini berhasil menumbuhkan rasa bangga dan cinta tanah air. Ini adalah "tombak" naratif yang mengimbangi banjir informasi negatif dan membangun citra bangsa yang optimis.

Komunikasi Strategis: Influencer, Gamifikasi, dan Kolaborasi

Perisai (literasi) dan tombak (narasi) memerlukan sistem pengiriman yang efektif. Strategi komunikasi digital harus relevan dengan audiens target, terutama generasi muda. Ini mencakup kolaborasi dengan *influencer* dan tokoh publik yang memiliki kredibilitas untuk menyampaikan pesan kebangsaan. Konten harus dikemas secara menarik, interaktif, dan relevan, misalnya melalui *gamifikasi* (kuis, tantangan digital) atau video pendek di platform seperti TikTok dan Instagram. Kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan kreator konten diperlukan untuk memperluas jangkauan pesan kebangsaan di ruang digital.¹⁵

Strategi penguatan Sila Persatuan yang diuraikan dalam laporan ini Kultural, Institusional, dan Digital bukanlah pilihan-pilihan yang terpisah. Ketiganya merupakan satu kesatuan holistik yang saling bergantung dan memperkuat. Revitalisasi PPKn secara digital (strategi institusional) tidak akan efektif tanpa Literasi Digital Etis (strategi digital). Praktik gotong royong (strategi kultural) akan tumpul jika kesenjangan ekonomi akibat kegagalan Otonomi Daerah (strategi institusional) masih menganga lebar.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, persatuan nasional menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring perkembangan zaman, terutama

¹² Muhammad Mansyur, "Model Literasi Digital Untuk Melawan Ujaran Kebencian Di Media Sosial Digital Literacy Model to Counter Hate Speech on Social Media" 22, no. 2 (2020): 125–42.

¹³ Wahyu Nur Annisa, Cahyani Widya Agustina, and Wahyuningtyas Puspitasari, "Peran Literasi Digital Untuk Mencegah Penyebaran Hoaks" 1, no. 2 (2021): 113–18.

¹⁴ Jurnal Masyarakat and Madani Indonesia, "Analisis Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Dalam Meningkatkan Kesadaran Nasionalisme Warga Negara Indonesia" 4, no. 4 (2025): 1–11.

¹⁵ Ahmad Muhamad et al., "Digital Pancasila : Strategi Komunikasi Dalam Mempromosikan Nilai-Nilai Kebangsaan Di Era Media Sosial," 2025.

di era digital. Ancaman terhadap persatuan tidak hanya muncul dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam dimensi ideologis, sosial-kultural, dan digital. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidimensi yang menggabungkan strategi kultural, institusional, dan digital untuk menjaga daya tahan bangsa.

Era digital membawa dampak ambivalen bagi kehidupan sosial-politik Indonesia. Di satu sisi, kemajuan teknologi informasi mempercepat arus komunikasi dan pertukaran pengetahuan. Namun, di sisi lain, muncul ancaman serius berupa polarisasi, disinformasi atau hoaks, serta ujaran kebencian di ruang digital. Fenomena ini berpotensi merusak dialog sipil, melemahkan ketahanan nasional, dan menyebabkan fragmentasi sosial antarwarga negara. Respon terhadap ancaman digital harus dimulai dari ranah kultural, melalui penguatan dialog antarbudaya yang mendorong empati lintas identitas sosial dan politik. Di samping itu, revitalisasi pendidikan kewarganegaraan (PPKn) dalam konteks digital menjadi langkah penting untuk membentuk kesadaran generasi muda terhadap etika bermedia dan tanggung jawab digital.

Pada sisi institusional, negara perlu memperkuat tata kelola informasi publik dan kolaborasi antar-lembaga dalam menangkal penyebaran hoaks serta ujaran kebencian. Sementara itu, dalam ranah digital, perlu dikembangkan dua strategi utama: literasi digital berbasis etika moral, dan ofensif narasi positif yang menandingi konten destruktif dengan pesan kebangsaan yang inklusif dan inspiratif. Ancaman ideologis seperti radikalisme dan eksklusivisme masih menjadi tantangan fundamental bagi persatuan bangsa. Ideologi ekstrem berpotensi menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan memecah belah umat melalui tafsir sempit atas agama atau identitas tertentu.

Dalam menghadapi hal ini, strategi kultural perlu difokuskan pada penguatan dialog antaragama yang menumbuhkan sikap saling menghormati dan membangun teologi moderat. Pendekatan kultural ini tidak hanya mencegah radikalisasi, tetapi juga menumbuhkan kesadaran spiritual yang terbuka dan kontekstual dengan nilai-nilai Pancasila. Pada tataran institusional, pemerintah perlu menegakkan hukum dengan tegas melalui kerangka regulasi seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, serta Program Bela Negara yang memperkuat nasionalisme. Adapun dari aspek digital, strategi yang efektif adalah kontra-radikalisasi melalui penyebaran narasi moderat, khususnya dengan melibatkan influencer dan tokoh publik yang mampu membangun opini positif di ruang maya.

Ancaman yang bersumber dari aspek struktural dan sosio-kultural juga tidak kalah berbahaya. Ketimpangan ekonomi, kesenjangan sosial, korupsi, serta individualisme global dapat menggerus rasa solidaritas dan memperlemah kohesi sosial masyarakat. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut menciptakan lahan subur bagi radikalisme dan memicu krisis identitas lokal, karena masyarakat kehilangan rasa memiliki terhadap nilai-nilai kebersamaan. Strategi kultural untuk menghadapinya adalah menghidupkan kembali praktik gotong royong sebagai bentuk solidaritas mikro dan memperkuat kearifan lokal dalam penyelesaian konflik. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai “imunitas sosial” yang memperkuat daya tahan masyarakat dari pengaruh ideologi individualistik global. Pada level institusional, penerapan otonomi daerah yang efektif menjadi kunci dalam

mendorong pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi, sehingga setiap daerah memiliki peluang yang setara dalam menikmati hasil pembangunan nasional. Sedangkan dalam respon digital, perlu dilakukan kampanye cinta produk lokal serta promosi budaya daerah melalui media sosial dan platform digital. Upaya ini bukan hanya memperkuat identitas nasional, tetapi juga menjadi strategi ekonomi kultural yang menumbuhkan kebanggaan terhadap keberagaman Indonesia.

Proyeksi Perwujudan Karakter Bangsa

Implementasi strategi holistik ini secara konsisten akan mentransformasi Sila Persatuan dari sebuah konsep menjadi instrumen aktif yang mewujudkan tiga atribut karakter bangsa yang dicita-citakan:

1. Karakter Utuh: Akan terwujud ketika strategi kultural (Dialog Antarbudaya) dan strategi digital (Literasi Etika) berhasil memulihkan dialog sipil yang sehat. Ini akan menyembuhkan keretakan sosial akibat polarisasi dan membangun kembali kepercayaan sosial horizontal, menghasilkan sebuah bangsa yang utuh secara sosial dan moral.
2. Karakter Fundamental: Akan terwujud ketika strategi institusional (PPKn yang direvitalisasi) dan strategi kultural (Kearifan Lokal dan Gotong Royong) berhasil menginternalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam perilaku sehari-hari. Karakter ini menjadikan Pancasila sebagai fondasi moral yang kokoh dan fundamental dalam setiap tindakan warga negara.
3. Karakter Berdaulat: Akan terwujud ketika PPKn menghasilkan "wawasan global berjiwa nasionalis, strategi digital (Narasi Positif) membangun kebanggaan emosional yang tangguh, dan Otonomi Daerah berhasil mengurangi ketidakadilan. Ini adalah perwujudan karakter bangsa yang mandiri, percaya diri, dan mampu menghadapi dinamika global sesuai dengan cita-cita nasional, menegakkan kedaulatan NKRI sebagai wujud akhir dari Bela Negara.¹⁶

KESIMPULAN

Sila Persatuan Indonesia tidak hanya berperan sebagai semboyan ideologis dalam Pancasila, tetapi juga merupakan fondasi moral dan fungsional yang menopang eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang sarat tantangan, nilai persatuan menghadapi berbagai bentuk ancaman baru, seperti polarisasi politik, penyebaran disinformasi, radikalisme, serta ketimpangan sosial-ekonomi yang berpotensi melemahkan kohesi nasional. Oleh sebab itu, penguatan Sila Persatuan harus ditempuh melalui pendekatan yang bersifat menyeluruh dan terpadu.

Pendekatan tersebut mencakup tiga dimensi utama. Pertama, dimensi kultural, yang menitikberatkan pada penghidupan kembali semangat gotong royong, pelestarian kearifan lokal, serta penguatan dialog antarbudaya dan antaragama sebagai bentuk ketahanan sosial masyarakat. Kedua, dimensi institusional, yang meliputi revitalisasi

¹⁶ Zainudin Hasan, *Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2025.

Pendidikan Pancasila agar lebih relevan dengan konteks digital, penegakan hukum penanganan konflik secara konsisten, serta pelaksanaan otonomi daerah yang berorientasi pada keadilan dan pemerataan. Ketiga, dimensi digital, yang berfokus pada pengembangan literasi digital beretika dan pembentukan narasi positif guna menumbuhkan rasa kebangsaan serta menangkal penyebaran ujaran kebencian dan informasi palsu.

Apabila ketiga dimensi tersebut dijalankan secara sinergis dan berkesinambungan, maka Sila Persatuan Indonesia dapat berfungsi sebagai instrumen aktif pembentuk karakter bangsa yang utuh, berakar kuat, dan berdaulat. Karakter yang utuh tercermin dari terbangunnya kembali kepercayaan sosial dan harmoni antarkelompok; karakter yang fundamental lahir dari internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam perilaku sehari-hari; sedangkan karakter yang berdaulat tampak melalui kemampuan bangsa untuk beradaptasi secara global tanpa kehilangan identitas nasional. Dengan demikian, penguatan Sila Persatuan Indonesia menjadi langkah strategis dalam menjaga keutuhan NKRI sekaligus mewujudkan cita-cita luhur Pancasila dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amilin, Prof, And M Si. "Pengaruh Hoaks Politik Dalam Era Post-Truth Terhadap Ketahanan Nasional Dan Dampaknya Pada Kelangsungan Pembangunan Nasional," No. September (2019): 5–11.*
- Annisa, Wahyu Nur, Cahyani Widya Agustina, And Wahyuningtyas Puspitasari. "Peran Literasi Digital Untuk Mencegah Penyebaran Hoaks" 1, No. 2 (2021): 113–18.*
- Area, Universitas Medan. "Polarisasi Politik Dan Tantangan Terhadap Dialog Sipil : Suatu Analisis Komunikasi Politik," N.D., 1–11.*
- Desta, Sonia, Primerta Putri Hapsari, Faiqotus Silvia, Kata Peran, And Otonomi Daerah. "Peran Otonomi Daerah Dalam Mencegah Disintegrasi : Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Di Indonesia Undang-Undang Dengan Berdasar Atas Pesatuan," 1999.*
- Hasan, Zainudin. Pancasila Dan Kewarganegaraan, 2025.*
- Kariadi, Dodik. "Revitalisasi Nilai-Nilai Edukatif Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Masyarakat Berwawasan Global Berjiwa Nasionalis" 1 (2016).*
- Khamid, Nur, And Dosen Iain Surakarta. "Bahaya Radikalisme Terhadap Nkri," N.D. Malang, Universitas Negeri. "Hakekat Nilai Persatuan Dalam Konteks Indonesia (Sebuah Tinjauan Kontekstual Positif Sila Ketiga Pancasila)" 3 (N.D.): 56–63.*
- Mansyur, Muhammad. "Model Literasi Digital Untuk Melawan Ujaran Kebencian Di Media Sosial Digital Literacy Model To Counter Hate Speech On Social Media" 22, No. 2 (2020): 125–42.*
- Masyarakat, Jurnal, And Madani Indonesia. "Analisis Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Dalam Meningkatkan Kesadaran Nasionalisme Warga Negara Indonesia" 4, No. 4 (2025): 1–11.*

**STRATEGI HOLISTIK PENGUATAN SILA PERSATUAN: INSTRUMEN FUNDAMENTAL
PERWUJUDAN KARAKTER BANGSA YANG UTUH DAN BERDAULAT**

- Muhamad, Ahmad, Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, And Adiningrum Dwi. "Digital Pancasila : Strategi Komunikasi Dalam Mempromosikan Nilai-Nilai Kebangsaan Di Era Media Sosial," 2025.*
- Pertahanan, Aspek, Dalam Rencana, Pindahan Ibu, Kota Negara, Menilik Kemampuan, P T Pal, Indonesia Sebagai, Matra Laut, Meluruskan Polemik, And Rencana Dwifungsi. "Persatuan Indonesia Yang Berdasarkan Kesepakatan Oleh Aparatur Sipil Negara Kementerian Pertahanan Untuk Bela Negara" 4 (2019).*
- Rahadi, Afif, And Fatma Ulfatun Najicha. "Menciptakan Persatuan Sekaligus Membentuk Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Dan Pancasila Di Era Globalisasi," No. Desember (2023).*
- Saraswati, Pritha Trisna, Universitas Duta, And Bangsa Surakarta. "Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Meningkatkan" 2 (2025): 198–204.*
- Sosial, Penanganan Konflik, Dengan Rahmat, Tuhan Yang, Maha Esa, And Presiden Republik Indonesia. "Lembaran Negara," No. 116 (2012).*